

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, K. (2016). Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Secara Akuntabel Menuju Good Governance. *Potret Pemikiran*, 20(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 63–70. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8e487ca97cfull.pdf>.
- Christina, M. (2018). *Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial Organisasi*. 4.
- Fauziah, I. A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gie. (2021). *Budgeting Adalah: Berikut Pengertian, Tujuan, Proses dan Prinsipnya - Accurate Online*. <https://accurate.id/akuntansi/budgeting-adalah/>
- Harun, C. Z., & Jemarin. (2016). Implementasi Manajemen Penganggaran Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh. *None*, 4(1), 63–71.
- Hoesada, J., & Ling, M. (2014). *Barang Milik Negara/Daerah*. <https://doi.org/10.1038/s41379-020-0580-6>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat. (2016). Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Perumahan (Modul Pengelolaan Barang Milik Negara). In *Simantu.Pu.Go.Id*. https://simantu.pu.go.id/epel/edok/56638_17_-_Modul_Pengelolaan_BMN.pdf
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Buletin Teknis No. 09 Tentang Akuntansi Aset tetap*. http://www.ksap.org/Buletin/Bultek_09_Akuntansi_Aset_Tetap.pdf
- Maruta, H. (2017). Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 1(1), 63–97. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/100>
- Monik Ajeng Puspitoarum. (2016). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. *Jurnal Administrative Reform*, 229–241.
- Nurdiansyah, D. H. (2018). Analisis Sistem Penganggaran Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Yayasan As-Syifa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jimb.v2i1.12783>
- Purwandari, A. W., & Mussadun, M. (2015). Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(4), 377–390.
- Rindengan, M. (2016). Kepemimpinan Lurah Dalam Pelayanan Administrasi Di Kelurahan Tinoor I Kecamatan Tomohon Utara. *Jurnal Politico*, 5(1).
- Robial, D. F. (2017). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik. *Manajemen Ekonomi*, 1–15. <https://www.neliti.com/id/publications/1137/peran-pemerintah-kelurahan-dalam-mewujudkan-kepemerintahan-yang-baik-studi-di-ke>

- Roejito, & Hamka, K. (2019). *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150.
<https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.138-150>
- Sidik, M. (2017). *Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-Fiskal.html#:~:text=Aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor,maupun masyarakat%2C serta dapat diukur>
- Soleh, C., & Heru, R. (2010). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah / Chabib Soleh, Heru Rochmansjah | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (Cetakan Ed). Fokusmedia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=491773#>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17.
<https://doi.org/10.22146/jkap.7523>